



LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2019

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

JLN. SETIA BUDI NO. 15 PADANG TELP. (0751) 811341, FAX. (0751) 811342

<http://dpmpisp.sumbarprov.go.id>

PADANG



ebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah serta menginformasikan LPPD kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Bahan LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Padang, Januari 2020
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

MASWAR DEDI. AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740618 199311 1 001



ebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah serta menginformasikan LPPD kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Bahan LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Padang, Januari 2020
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

MASWAR DEDI. AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740618 199311 1 001



ebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah serta menginformasikan LPPD kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Bahan LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Padang, Januari 2020
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

MASWAR DEDI. AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740618 199311 1 001

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sebelumnya Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat, terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Usaha Daerah.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, telah disusun Rencana Strategis untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini menjadi dasar dan acuan penyusunan program kerja bidang di lingkungan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Usaha Daerah.

B. TUPOKSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Usaha Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Gubernur di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan teknis dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan;
 - Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal , terdiri dari;
 - Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
 - Seksi Pemberdayaan Usaha;
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
 - Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
- a. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari;
 - Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari;

- Seksi Pelayanan Perizinan I;
- Seksi Pelayanan Perizinan II;
- Seksi Pelayanan Non Perizinan;

g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan, terdiri dari;

- Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
- Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
- Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;

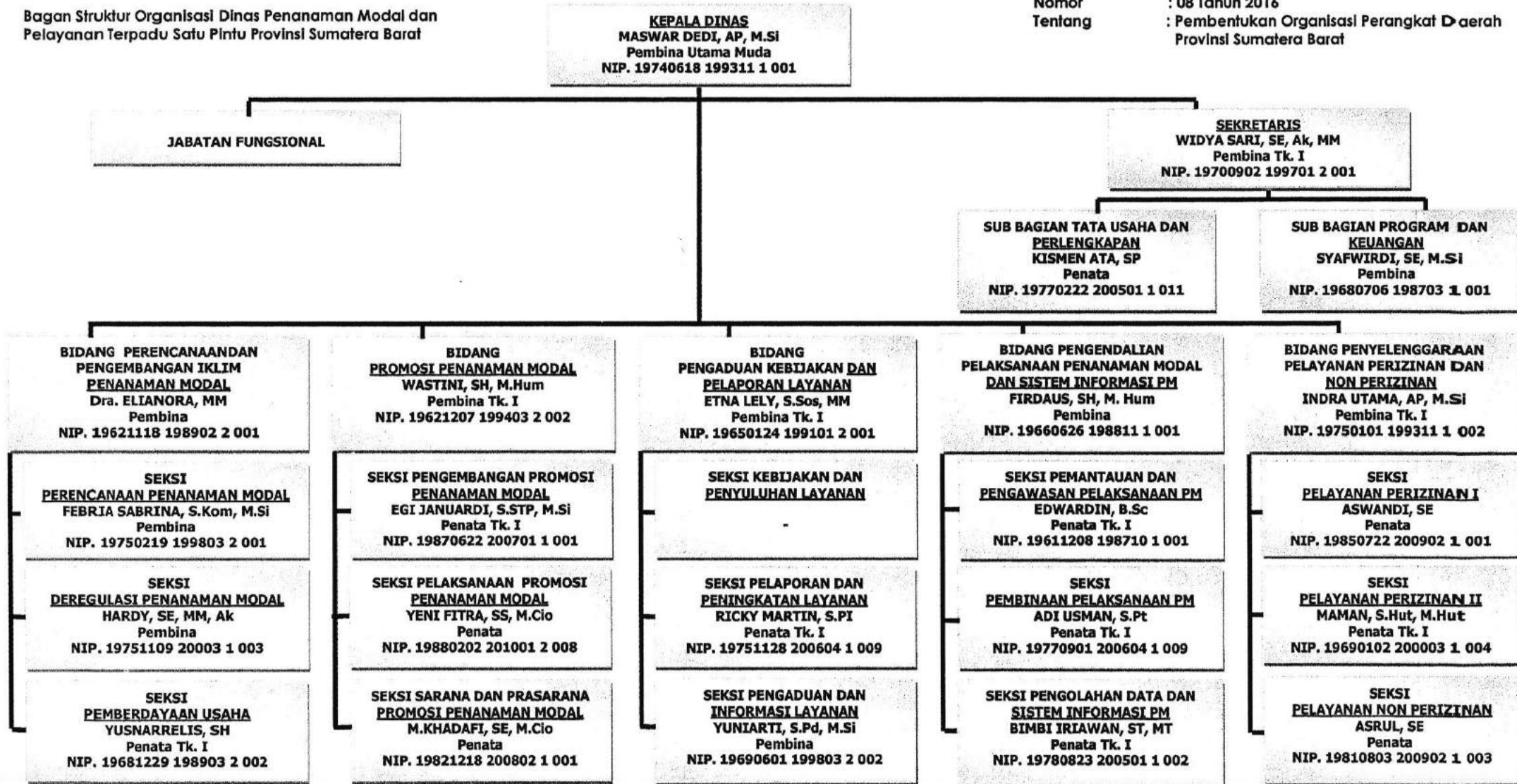
h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat secara lengkap yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1.

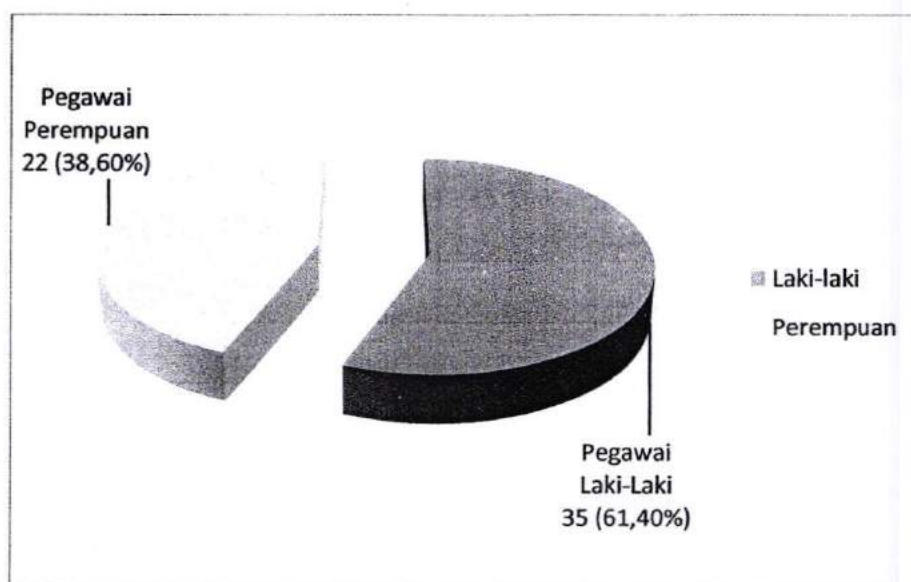
Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 08 Tahun 2016
Tentang : Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat



Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 57 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 35 orang (61,40%) laki-laki dan 22 orang (38,60%) perempuan. Dari data tersebut jumlah perempuan dengan laki-laki sebanding sehingga tidak memiliki pengaruh secara terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Gambar 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Berikut adalah komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

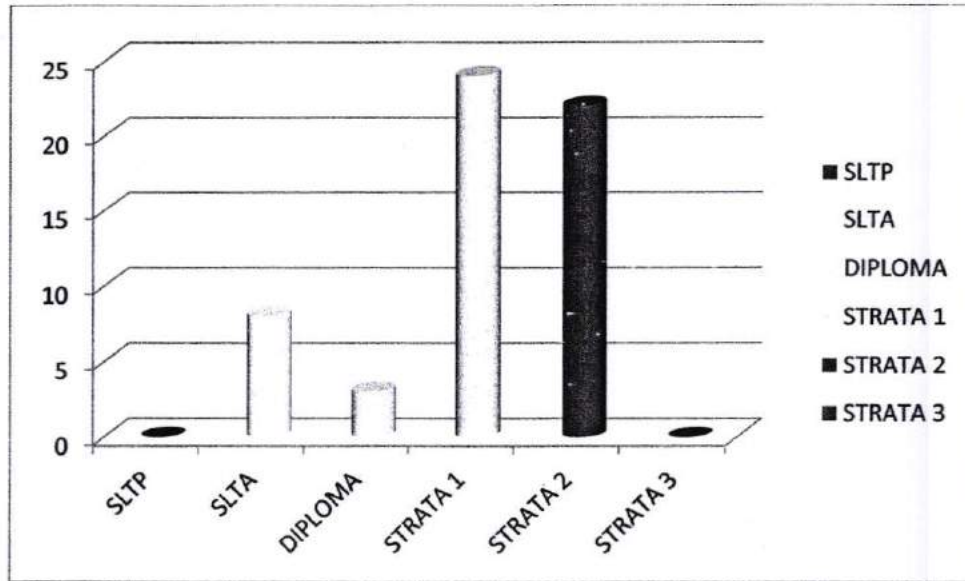
Tabel 1.1.
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6
1	SLTP	=	=	=	0%
2	SLTA	6	2	8	14,04%
3	DIPLOMA III/ D-3	1	2	3	5,26%
4	STRATA 1	15	9	24	42,10%
5	STRATA 2	13	9	22	38,60%
6	STRATA 3	-	-	-	0%
	JUMLAH	35	22	57	100,00%

Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sangat memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat karena lebih dari 85,96% pegawai sudah berpendidikan sarjana, diantaranya 38,60% pegawai sudah berpendidikan pasca sarjana. Khusus untuk bidang pelayanan perizinan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait layanan perizinan disamping melalui diklat teknis, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

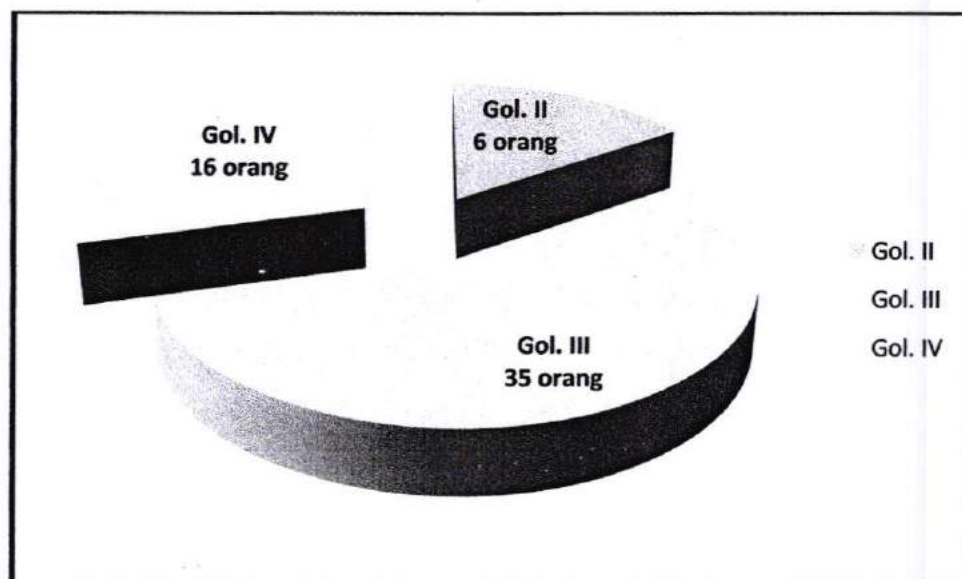
Tabel 1.2.
Daftar Golongan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6
1	Golongan I	=	=	0	0%
2	Golongan II	5	1	6	10,53%
3	Golongan III	22	13	35	61,40%
4	Golongan IV	8	8	16	28,07%
	JUMLAH	35	22	57	100,00%

Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 84,48% pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah golongan III dan IV, merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 2 dan Strata 1 dan Sarjana Muda. Pegawai yang berpendidikan Strata I pada umumnya sudah menduduki pangkat puncak pada jenjang kepangkatannya dan telah memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Berikut jumlah PNS Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per golongan:

Gambar 4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

C. ANGGARAN

Pelaksanaan Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 didukung oleh Anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 18.844.555.957,- (perubahan anggaran) yang terdiri dari :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | : Rp. 6.654.869.912,00 |
| ▪ Gaji dan Tunjangan | : Rp. 4.019.028.911,00 |
| ▪ Tambahan Penghasilan PNS | : Rp. 2.528.607.768,00 |
| ▪ Insentif Pungutan Retibusi | : Rp. 35.233.233,00 |
| b. Belanja Langsung | : Rp. 12.189.686.045,00 |

Terdiri dari:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ▪ Belanja langsung pokok | : 5 Program, 23 kegiatan. |
| ▪ Belanja langsung urusan | : 2 Program, 21 kegiatan. |

D. IVENTARISASI ASET

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai untuk mendukung pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Nilai aset yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per Desember 2019 sebesar Rp. 5.678.340.966,- semuanya merupakan aset tetap yang terdiri dari Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 5.198.938.166,-. Dan Aset Lainnya sebesar Rp. 479.402.800,- Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per Desember 2019, sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Daftar Aset DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Per Desember 2019

No	Jenis Barang	Jumlah
1	2	3
I.	ASET TETAP	
1	Golongan Tanah Tanah	-
2	- Golongan Peralatan dan Mesin - Alat-alat besar - Alat-alat angkutan - Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Pertanian - Alat kantor dan rumah tangga - Alat studio dan alat komunikasi	2 unit 11 unit 7 unit 1 unit 492 unit 10 unit
3	Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	-
4	Golongan Aset Tetap lainnya Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kebudayaan	15 Buah 3 Unit
II.	ASET LAINNYA	
1	Aset tidak berwujud	5 unit
2	Aset tidak bermanfaat	-

Sumber : Laporan Tahunan Barang Milik Daerah (BMD) DPM & PTSP Tahun 2019

E. SARANA DAN PRASARANA

Disamping sumber daya manusia yang professional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat belum dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat belum memiliki gedung yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas secara professional.

Sarana dan prasarana gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terdiri dari ruangan Kepala Badan, ruangan Sekretariat, ruangan bidang pelayanan perizinan, ruangan bidang perencanaan, ruangan pengendalian, ruangan pengaduan dan ruangan bidang promosi. Selain itu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga terdapat ruangan rapat yang dipergunakan untuk pertemuan berkala dan rapat teknis dengan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memiliki 8 (delapan) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.4 dibawah:

Tabel 1.4.
Daftar Kendaraan Dinas
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019

No	Jenis Kendaraan	Merk	Dipergunakan Untuk
1	2	3	4
1	Sepeda Motor	Honda	Caraka
2	Sepeda Motor	Honda Vario	Operasional Administrasi
3	Sepeda Motor	Honda Vario	Operasional Administrasi
4	Mobil	Kijang Innova	Operasional Administrasi
5	Mobil	Honda Accord	Operasional Administrasi
6	Mobil	Mitsubishi Kuda	Operasional Administrasi
7	Mini Bus	Kijang Innova	Operasional Administrasi
8	Mini Bus	Kijang Innova	Operasional Administrasi
9	Mini Bus	Pajero Sport	Operasional Kepala Badan
10	Mobil Double Gardan	Mitsubishi	Operasional Administrasi
11	Mini Bus	Kijang Innova	Operasional Administrasi

Sumber :Laporan Tahunan Barang Milik Daerah (BMD) DPM & PTSP2019

F. INFORMASI PELAYANAN

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah khusus pelayanan perizinan dan non perizinan. Adapun perkembangan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Rekapitulasi Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2019

TAHUN	PERIZINAN	NON PERIZINAN	TOTAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2015	665	20	685	665 Izin; 20 Rekomendasi
2016	1.098	7	1.105	1.098 Izin; 7 Rekomendasi
2017	1.411	708	2.119	1.411 Izin; 708 Rekomendasi
2018	1.007	2.118	3.125	1.007 Izin; 2.118 Rekomendasi
2019	1.480	1.694	3.174	1.480 Izin; 1.694 Rekomendasi
TOTAL	5.661	4.547	10.208	5.661 Izin; 4.547 Rekomendasi

Sumber :Buku Data dan Informasi Pembangunan Tahun 2015-2019

Perkembangan pelayanan dasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar Kebijakan Penanaman Modal dengan indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan dapat tercapai dengan tersusunnya potensi dan peluang investasi kabupaten/kota se Sumatera Barat serta Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal 1 sektor.

2. Pelayanan dasar Kerjasama Penanaman Modal oleh PDPPM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Kecil kabupaten/kota se Sumatera Barat dengan pengusaha tingkat Nasional/asing dengan indikator terselenggaranya Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah yang difasilitasi pemerintah daerah provinsi dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha kecil kabupaten/kota se Sumatera Barat dengan pengusaha nasional/asing dapat tercapai sebanyak 1 (satu) kali pertemuan sesuai target nasional.
3. Pelayanan dasar Promosi Penanaman Modal Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dengan indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal dalam negeri sebanyak 22 (dua puluh dua) event dengan rincian, mengikuti event/pameran promosi dalam negeri sebanyak 5 (tujuh) event dan luar negeri sebanyak 17 (enam belas) event dan gelar potensi dan temu usaha daerah sebanyak 1 (satu) kali.
4. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat provinsi dengan tingkat capaian sebesar 82,51%.

Dalam rangka penyelenggaraan PTSP telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Gubernur kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 247 jenis perizinan yang terdiri dari 19 sektor. Kinerja PTSP pada tahun 2019 secara keseluruhan dapat dinilai sangat baik, dimana jumlah izin yang diterbitkan oleh PTSP Sumatera Barat sebanyak 1.480 izin dan 1.694 rekomendasi. Dari 19 sektor yang dilayani, hanya 4 sektor yang tidak ada penerbitan izin ataupun rekomendasi yaitu sektor Penanaman Modal, Pariwisata dan Perumahan

rakyat dan pertanahan serta Sektor Koperasi dan UKM. Rincian perizinan/non perizinan yang diterbitkan PTSP sebagaimana Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Perizinan/Non Perizinan yang Diterbitkan PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019

NO	SEKTOR	IZIN	NON IZIN (REKOMENDASI)
1	2	3	4
1	Penanaman Modal	-	-
2	Perindustrian Dan Perdagangan	2	-
3	Energi Dan Sumber Daya Mineral	491	-
4	Tenaga Kerja	41	1
5	Kesehatan	43	16
6	Kehutanan	114	10
7	Pendidikan	12	-
8	Kelautan dan Perikanan	492	-
9	Perkebunan	4	-
10	Lingkungan Hidup	11	-
11	Pariwisata	-	-
12	Perhubungan	206	59
13	Peternakan	23	38
14	PU dan Penataan Ruang	3	-
15	PSDA	9	-
16	Sosial	29	8
17	Perumahan Rakyat, Pertanahan	-	-
18	Koperasi dan UKM	-	-
19	Kesbang Pol	-	1.562
JUMLAH		1.480	1.694
TOTAL		3.174	

Sumber : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2018

5. Pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal dan sudah dilaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan sumber dana

dari APBD dari 20 perusahaan yang ditargetkan terlaksana 29 perusahaan atau dengan capaian 145% disamping itu juga ada sumber dana dari APBN (Dekonsentrasi).

6. Pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dapat tercapai 100%, dengan jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE sebanyak 4 (empat) jenis pelayanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS) juga telah bertaklukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.
7. Pelayanan dasar Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha melalui 2 media, yakni media cetak dan media elektronik.

II. DOKUMEN PERENCANAAN

A. RENSTRA

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 dibunyikan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Kepala SKPD, dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Dan selanjutnya Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Kepala SKPD setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah :

- a. Memberi arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan, kebersamaan dan tanggung jawab bidang di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sekaligus memberikan motivasi, pengembangan inovatif, dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan penanaman modal daerah.
- b. Memberi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan untuk mencapai visi dari pelaksanaan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan;
- c. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;

- d. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
- e. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan & penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan;
- f. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- g. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

VISI

Dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kewenangan daerah dibidang penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Usaha Daerah agar terarah dan terfokus pada hasil yang ingin dicapai supaya tercipta kesamaan pandangan dan partisipasi melalui perumusan, masukan, saran, aspirasi dan inspirasi seluruh bidang-bidang, disusun rumusan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Rumusan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mencerminkan apa yang ingin dicapai selama kurun waktu 2016-2021 adalah:

Misi suatu instansi pemerintah merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan

MISI

mengembangkan seluruh potensi pembangunan di daerah. permasalahan tatanan pelayanan publik menjadi tolok keberhasilan instansi dengan dipandang perlu untuk meningkatkan pelayanan bagi publik. Pada saat sekarang Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang merupakan SKPD penunjang dan juga visi diatas merupakan kebutuhan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan daerah lain.

sumberdaya daerah dan pelayanan investasi sehingga mampu bersaing dengan c. **Berdasyaing**, maksudnya mampu mengeksplorasi keunggulan dan keunikan dan profesional.

pelayanan investasi yang berkualitas melalui serangkaian pendekatan yang inovatif b. **Unggul**, maksudnya mampu mengeksplorasi keunggulan sumberdaya daerah dan di masa mendatang.

sehingga mampu menarik minat para calon investor untuk mengamankan modalnya mengkomunikasikan semua potensi investasi yang terdapat di Sumatera Barat, a. **Tujuan investasi yang menarik**, maksudnya mampu menjadikan dan adalah:

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat di atas, Adapun makna pokok yang terkandung dalam visi yang ingin dicapai Dinas

"MENJADIKAN SUMATERA BARAT SEBAGAI DAERAH TUJUAN INVESTASI YANG MENARIK, UNGGUL DAN BERDAYASAING"

pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah negara.

Selaras dengan Visi yang telah ditetapkan, Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu Provinsi Sumatera Barat.

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- a. Mendukung terwujudnya peningkatan daya tarik investasi di Sumatera Barat;
- b. Meningkatkan pelayanan investasi yang berkualitas.

Visi dan Misi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dan mendukung visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat, yakni pada misi kedua **"Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional"** dan misi ke empat **Meningkatnya Ekonomi Masyarakat yang Tangguh, Produktif, dan Berdaya Saing Regional dan Global, dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan Daerah"**

B. RENJA TAHUNAN

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang-bidang dan Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menyangkut penanaman modal

sesuai kewenangan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal di atas untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dan mewujudkan tujuan dan sasaran daerah, Tahun 2019 program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (10 Kegiatan);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (6 Kegiatan);
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1 Kegiatan);
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (1 Kegiatan);
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (5 Kegiatan);
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi(14 Kegiatan);
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu (7 Kegiatan).

Rencana Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan DPM & PTSP Tahun 2019 adalah :

NO.	NAMA PROGRAM	JUMLAH DANA (Rp.)	KET.
1	2	3	4
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.376.910.625,-	10 kegiatan
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	599.642.261,-	6 kegiatan
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44.460.000,-	1 kegiatan
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	977.974.300,-	1 kegiatan

V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	599.206.259,-	5 kegiatan
VI.	Program Pengembangan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	4.442.420.010,-	10 kegiatan
VII.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	4.219.072.570,-	7 kegiatan
JUMLAH		12.189.686.025,-	44 kegiatan

Sumber : DPPA DPM & PTSP Tahun 2019

III. DATA KINERJA DAN KEUANGAN

A. DATA KINERJA SKPD

Pelaksanaan Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 didukung oleh Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 18.844.555.957,- yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	: Rp.	6.654.869.912,-
- Gaji dan Tunjangan	: Rp.	4.091.028.911,-
- Tambahan Penghasilan PNS	: Rp.	2.528.607.768,-
- Insentif Pungutan Retribusi	: Rp.	35.233.233,-
b. Belanja Langsung	: Rp.	12.189.686.045,-

Terdiri dari : 7 Program dan 44 Kegiatan.

Program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu.

Jumlah Anggaran yang disediakan oleh APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 untuk masing-masing Program adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8
Program dan Anggaran DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019

NAMA KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1		2
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.376.910.625,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	599.642.281,-
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44.460.000,-
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	977.974.300,-
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	529.206.259,-
6.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	4.442.420.010,-
7.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	4.219.072.570,-
	Total	12.189.686.045,-

B. KEGIATAN TAHUN 2019

Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.376.910.625,-
1	Penyediaan jasa surat menyurat	27.333.846,-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	171.720.000,-
3	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan Sopir kantor	539.454.079,-
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.000.000,-
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,-
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000,-
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.160.000,-
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	492.840.700,-
9	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	14.850.000,-
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	29.952.000,-
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	599.642.281,-
1	Pengadaan Mebeuler	26.700.000,-
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.000.000,-
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	155.657.281,-
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.900.000,-
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler	9.385.000,-
6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	305.000.000,-
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44.460.000,-
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	44.460.000,-
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	977.974.300,-
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	977.974.300,-
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	529.206.259,-
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	54.790.160,-
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	226.994.750,-
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.178.876,-
4	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	35.303.900,-
5	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	121.938.573,-

VI	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	4.442.420.010,-
1	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	165.358.360,-
2	Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat	70.761.480,-
3	Kerjasama Promosi dan Misi Investasi	197.217.200,-
4	Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	141.615.000,-
5	Gelar Potensi dan Temu Usaha	554.963.300,-
6	Promosi Investasi	2.550.856.320,-
7	Koordinasi Strategi Promosi dan Peluang Investasi	37.584.000,-
8	Forum Investasi Sumatera Barat	115.301.800,-
9	Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi	165.672.000,-
10	Penyelesaian Permasalahan Investasi	60.451.600,-
11	Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat	145.357.000,-
12	Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal	42.100.000,-
13	Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal	83.180.900,-
14	Forum Komunikasi Usaha Daerah	70.317.300,-
VII.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	4.219.072.570,-
1	Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi	406.740.400,-
2	Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan	115.579.780,-
3	Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Terpadu	115.098.240,-
4	Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan	1.176.886.900,-
5	Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan	326.573.500,-
6	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	2.003.193.750,-
7	Penilaian Standar Mutu Perizinan	35.000.000,-
	JUMLAH	12.189.686.045,-

C. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 1.376.910.625,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.365.594.255,- atau sebesar 99,18%.

Realisasi anggaran kegiatan pada program ini pada umumnya diatas 95% dan realisasi anggaran kegiatan yang dibawah 95%, adalah anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 84,88% disebabkan efisiensi dalam belanja paket pengiriman, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar 94,70% dan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur sebesar 85,76%.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Keluaran:

Terwujudnya pengelolaan surat menyurat kantor selama 12 bulan, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dalam rangka tertib pelayanan administrasi perkantoran.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Keluaran:

Terpenuhinya kebutuhan listrik, telpon, air dan jaringan internet, SIPKD dan yang online selama 12 bulan, dengan capaian kinerja 100%.

- Hasil:**
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan suatu pemenuhan pokok kantor akan listrik, air, telepon dan internet.
- 3. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor**
- Keluaran:**
terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor selama 12 bulan, dengan capaian kinerja 100%.
- Hasil:**
Terlaksananya dan Terpeliharanya Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor
- 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor**
- Keluaran :**
Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 12 bulan, dengan capaian 100%.
- Hasil :**
Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan**
- Keluaran :**
Tersedianya barang-barang cetakan seperti kertas kop, map, amplop, dan lain-lain, serta tersedianya biaya pengandaan selama 12 bulan, dengan capaian 100%.
- Hasil :**
Hasil dari kegiatan ini adalah tertunjangnya pelayanan administrasi perkantoran.

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran :

Tersedianya alat-alat dan komponen listrik untuk penerangan bangunan kantor selama 12 bulan, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil :

Hasil dari kegiatan ini adalah tertunjangnya kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Keluaran :

Tersedianya biaya untuk langganan surat kabar selama 12 bulan baik itu media lokal maupun media nasional, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil :

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur.

8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

Keluaran :

Tersedianya anggaran untuk perjalanan kedinasan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi baik dalam daerah maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat selama 12 bulan, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil :

Hasil Dari kegiatan ini adalah terjalinnya koordinasi dengan daerah kab/kota ataupun pusat terkait dengan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

9. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Keluaran :

Tertindakannya wirid pengajian dan senam di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama 12 bulan.

Hasil :

Terbinanya mental dan fisik aparatur.

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

Keluaran :

Tersedianya biaya makan minum untuk penyelenggaraan rapat-rapat rutin kantor selama 12 bulan, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil :

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebesar Rp. 599.642.261,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 587.792.728,- atau sebesar 98,02%. Realisasi anggaran kegiatan pada program ini pada umumnya diatas 95%

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Pengadaan Mebeuler

Keluaran:

Dari kegiatan ini diperoleh 27 unit mebeuler kantor yang terdiri dari 10 unit kursi front office, 12 unit kursi kerja dan kursi ruang tunggu 5 unit, dengan capaian kinerja 108% dari target sebanyak 25 unit.

Hasil:

Meningkatnya kinerja dan lancarnya pelayanan DPM & PTSP serta terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur DPM & PTSP.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Keluaran:

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kenyamanan dan produktivitas kerja PNS di lingkungan DPM & PTSP.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran:

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas DPM & PTSP yang berjumlah 11 unit yang terdiri dari (8 unit mobil dan 3 unit motor) selama 12 bulan , dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas.

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran:

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan sebanyak 99 unit, dengan capaian Kinerja 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler

Keluaran:

Terpeliharanya meja, kursi dan mebel kantor lainnya sebanyak 24 unit, selama 12 bulan dengan capaian 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan mebeuler kantor.

6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran:

Dari kegiatan ini diperoleh 4 unit Dual Mobile Roll Pack, 2 Unit AC, & Unit PC, 3 Unit Laptop, 1 unit Pronter A3, 6 unit Printer A4/F\$ dan 5 Unit Scanner Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang akan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan DPM & PTSP, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Meningkatnya kinerja dan pelayanan DPM & PTSP.

C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 44.460.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 44.460.000,- atau sebesar 100%.

Rincian realisasi untuk kegiatan program peningkatan disiplin aparatur inisebagai berikut:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Keluaran:

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya untuk PNS DPM & PTSP, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Berpakaian Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 977.974.300,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 905.923.540,- atau sebesar 92,63%.

Rendahnya realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dibawah 95% karena ada sisa Anggaran pelaksanaan ToT terkait Pelayanan Publik Ke Azerbaijan yang merupakan sisa anggaran dari Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp. 11.340.249,- dan Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang ke Azerbaijan sebesar Rp. 60.553.758,-

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Keluaran:

Terlaksananya pengiriman PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti Bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam bertugas selama 12 bulan sebanyak 57 aparatur, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas aparatur di bidangnya.

E. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 529.206.259,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 518.036.469,- atau sebesar 97,89%.

Realisasi anggaran kegiatan pada program ini pada umumnya diatas 95% dan Sisa Anggaran yang tidak bisa direalisasikan atau efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program/ Kegiatan SKPD

Keluaran:

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran pada BKD seperti Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA dan DPPA, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Terwujudnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

2. Penatausahaan Keuangan SKPD

Keluaran:

Tersedianya laporan bulanan dari penatausahaan keuangan yang dilakukan dan terpenuhinya honorarium pengelola kegiatan dan keuangan (KPA, Bendahara, PPK, PPTK dan Pembantu Bendahara), dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Terwujudnya pengelolaan keuangan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keluaran:

Outputnya adalah laporan terkait akuntabilitas kinerja, seperti perjanjian kinerja, bahan LKPJ Gubernur, LPPD, Laporan Kinerja serta Laporan Keuangan dan lain sebagainya dan Pengukuran Kinerja Aparatur selama 12 bulan dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini meningkatnya kinerja SKPD DPM & PTSP.

4. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Keluaran:

Laporan Pemantauan dan Penilaian terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil:

Tersedianya data dan informasi terkait pelaksanaan program/kegiatan DPM & PTSP

5. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

Keluaran:

Tersedianya laporan Pengelolaan Semester dan Tahunan Aset, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Terwujudnya pengelolaan , Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

F. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi adalah sebesar Rp. 4.442.420.010,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 4.371.369.725,- atau sebesar 98,40%.

Realisasi anggaran kegiatan pada program ini pada umumnya diatas 95% dan realisasi anggaran kegiatan yang dibawah 95% adalah anggaran kegiatan Kerjasama Promosi dan Misi Investasi sebesar 94,54%, Pertemuan Strategi Promosi dan Peluang Investasi sebesar 89,43%, Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal sebesar 92,01%. Sisa Anggaran pada kegiatan dalam program ini sebagian besar sisa kegiatan yang tidak bisa direalisasikan karena Sisa dari pelaksanaan kegiatan.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Keluaran:

Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN sebanyak 29 perusahaan dari 20 perusahaan yang ditargetkan, dengan kinerja sebesar 145%.

Hasil:

Adanya penyampaian LKPM oleh perusahaan PMA/PMDN dan pelaksanaan kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 19 perusahaan dari 17 perusahaan yang diinginkan

2. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat

Keluaran:

Tersusunnya buku data perkembangan penanaman modal Sumatera Barat tahun 2018/2019 1 dokumen sebanyak 100 buah buku, dengan tingkat capaian kinerja 100%.

Hasil:

Tersedianya data perkembangan realisasi investasi, fasilitas dan non fasilitas di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat sehingga bisa dijadikan bahan pengambil kebijakan bagi stakeholders dan dunia usaha.

3. Kerjasama Promosi dan Misi Investasi

Keluaran:

Terlaksananya promosi dan misi investasi dengan 6 (enam) kabupaten/kota dari 6 (tujuh) kabupaten/kota yang ditargetkan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% dan jumlah calon investor yang difasilitasi sebanyak 6 calon investor sesuai target, sehingga capaian kinerjanya 100%.

Hasil:

Meningkatnya koordinasi promosi dan kerjasama dengan kabupaten/kota serta minat calon investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat, beberapa calon investor yang menunjukkan keseriusan untuk berinvestasi di sektor dan energy baru.

4. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Keluaran:

Telaksananya Pertemuan Koordinasi dan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dihadiri oleh 80 orang aparatur DPM & PTSP Kabupaten/kota se Sumatera Barat dengan capaian kinerja sebesar 100%, sehingga menghasilkan rumusan-rumusan didalam perencanaan, pelaksanaan penanaman modal, promosi, pengendalian dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Hasil:

Dihasilkan 4 (empat) rumusan rekomendasi terkait Perencanaan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Promosi, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu melebihi dari 4 (empat) target rumusan yang ditetapkan sehingga capaian hasil kerjanya juga 100%.

5. Gelar Potensi dan Temu Usaha

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan GPTU yang dihadiri oleh 100 orang calon investor yakni sebesar 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah terinformasikannya potensi dan peluang investasi yang ada di kabupaten / kota di Sumatera Barat kepada calon investor yang mengikuti temu usaha. Ketertarikan beberapa calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat, yakni:

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Minat Kerjasama
1	2	3	4
1.	Mayra Andrea (Indonesia Jordan Business Council) IJBC	IJBC	Kopi dan Maining
2.	I Gede Hasan	Travel	Wisata Kuda
3.	A.A. Gym	Pendidikan	Pendidikan Islami
4.	Joy	Pupuk	Industri Hilir Pupuk Organik
5.	Putrama Alkhairi	Pupuk	Industri Hilir Pupuk Organik
6.	PT. Nusantara Siana eEco Solusi	Energi Efisiensi dan Energi Terbarukan	Pengolahan Sampah menjadi Methanol
7.	Lewu Itah Organization	Obat-Obatan	Minyak Atsiri
8.	GTA LINH	Travel	Pariwisata
9.	Eric James	Energy	Geothermal, Hydropower dan Energy Development
10.	Che Maziah Hamid	Travel	Tours and Travel

6. Promosi Investasi

Keluaran:

Terwujudnya keikutsertaan Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan promosi investasi baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri sebanyak 22 event, dengan capaian kinerja 115,79%.

Hasil:

Dari keikutsertaan Sumatera Barat dalam beberapa event promosi investasi yang diikuti, menghasilkan ketertarikan calon investor, diantaranya:

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Minat Kerjasama
1	2	3	4
1.	Kishi Group	Penelitian dan Pengembangan Sintetis, di Berbagai Bidang Usaha Lain	Pengolahan Limbah Medis dan Rumah Tangga, Peternakan dan Perikanan
2.	Enersel Engine Company	Energy, Engine	Renewable Energy
3.	Centunion	Konstruksi Energy, Chemical dan Pengolahan Makanan	Proyek Infrastruktur
4.	AsFin (Emerging Markets Advisors	Perbankan, Hotel dan Pertanian	Data Investasi Publik
5.	Global World Energy OY	Energy	Pengolahan Limbah dan Ikan
6.	Bucharest	Kesehatan	Pencegahan Kanker

7.	OAV (German Asia – Pasific Business Association)	Pariwisata dan Energy	Geopark, Kawasan Wisata Bahari dan Industri Hilir Minyak Atsiri
8.	Shwe Taung Development Co. Ltd	Perhotelan	Perhotelan dan Industri Hilir (Rokok)
9.	Tomo Engineering	Energy	Kelapa Sawit, Bio Energy, Minyak dan Gas
10.	Power Energy	Energy	Solar Energy
11.	Lewu Itah Organization	Minyak Atsiri	Hilir Minyak Atsiri
12.	GTA LINH Travel	Travel	Pariwisata
13.	Zenith Real Estate Group	Wisata	Pariwisata
14.	Eric James Company	Energy	Geothermal, Hydropower, Energy Dvelopment
15.	Civil Service College Singapore	Perguruan Tinggi	Investasi Pendidikan
16.	Akmaziah Mobility Travel	Tour and Travel	Pariwisata
17.	Tour SDN BHD	Tour and Travel	Pariwisata
18.	Pound (Thailand)	Perkebunan	Kopi
19.	Mousa	Perkebunan	Jahe dan Makanan
20.	Arie (Jawa)	Energy	Pembangkit Listrik Tenaga Surya

7. Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan GPTU yang dihadiri oleh 50 orang Aparatur DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yakni sebesar 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini yang bertemakan "Pengembangan Potensi dan Peluang Investasi Daerah Melalui Strategi Promosi yang Inovatif" membahas tentang strategi promosi yang tepat sesuai dengan kondisi setiap daerah di Sumatera Barat dengan terlaksananya sosialisasi kegiatan ke Kab/kota, antara lain :

- Kab. Pesisir Selatan tgl. 14 s.d 15 Mei 2019
- Kab. Sijunjung tgl. 21 s.d 22 Mei 2019
- Kab. 50 Kota tgl. 22 s.d 23 Agustus 2019

- Kab. Agam tgl. 27 s.d 28 Agustus 2019
- Kab. Padang Pariaman tgl. 11 September 2019

8. Forum Investasi Sumatera Barat

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini terlaksananya pertemuan investasi Sumatera Barat yang diikuti oleh 100 (seratus) orang aparatur DPM & PTSP kabupaten/kota, instansi terkait dan perusahaan dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan dihadiri oleh 100 orangpeserta sebesar 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi dan mencari solusi dan diperoleh rumusan sebagai berikut :

- Perlu adanya percepatan pelayanan perizinan dimana adanya perubahan sistem untuk mempercepat pelayanan perizinan bagi investor, termasuk izin di sektor industri .
- Perlu adanya membuat forum yang mempertemukan calon investor dan pelaku usaha.
- Adanya permasalahan investasi seperti permasalahan perizinan, permasalahan lahan dan permasalahan yang berhubungan dengan deregulasi/kebijakan dapat diselesaikan dengan adanya Online Single Submission (OSS)
- Harus adanya jaminan Pemerintah untuk pemasaran, hal ini diperlukan untuk penyemangat petani lebih bergairah.
- Sektor industri termasuk salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian.

9. Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi

Keluaran:

Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Jumlah buku Feasibility Study Proyek Investasi Sektor Industri sebanyak 200 buku (100 buku versi Bahasa Indonesia dan 100 buku versi Bahasa Inggris).

Hasil:

Hasil (outcome) yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memudahkan investor/calon investor memperoleh memperoleh study kelayakan proyek investasi sektor industri (1 proyek).

10. Penyelesaian Permasalahan Investasi

Keluaran:

Terfasilitasinya permasalahan sebanyak 6 perusahaan PMA/PMDN dari 7 perusahaan yang ditargetkan dengan capaian kinerja sebesar 100% dan pembahasan proses penyelesaian permasalahan perusahaan melebihi target yang ditetapkan sebanyak 6 perusahaan atau sebesar 100%.

Hasil:

Hasil yang dicapai dari kegiatan penyelesaian permasalahan Investasi ini adalah tercapainya solusi pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN sebanyak 6 perusahaan atau sebesar 100% dari 6 perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahannya semuanya dapat diselesaikan, yakni :

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha
1	2	3
1.	CV. Batu Tongga	Pertambangan Batuan
2.	PT. Spectra Sun Energy	Pertambangan Batuan
3.	PT. Taruko Putra Nusantara	Pertambangan Batuan
4.	CV. Putra Karya Mandiri	Pertambangan Batuan
5.	PT. Dempo Sumber Energy	PLTMH
6.	Iswindiarti (Perseorangan)	-

11. Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat

Keluaran:

Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah buku Profil Peluang Investasi Sumatera Barat sebanyak 450 buku (300 buku versi Bahasa Inggris dan 150 buku versi Bahasa Indonesia).

Hasil:

Hasil (outcome) yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memudahkan investor/calon investor memperoleh data dan informasi peluang investasi Sumatera Barat sebanyak 9 peluang investasi.

12. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan GPTU yang dihadiri oleh 100 orang calon investor yakni sebesar 100% dan penyampaian informasi penanaman modal kepada calon investor.

Hasil:

Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal ini terdiri dari 3 (tiga) bentuk kegiatan yaitu Forum Investasi Sumatera Barat, Pameran Minangkabau Summit 2018 dan Penyebarluasan Informasi Melalui Media Massa.

13. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal

Keluaran:

Tersedianya data Spasial Dasar dan Tematik yang terbaru sebanyak 1 (satu) sektor serta Terlaksananya Updating Data Potensi Peluang Investasi Sumatera Barat yang ada pada 19 Kabupaten/Kota dengan capaian kinerjanya 100% sesuai dengan target.

Hasil:

Tersedianya Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal

14. Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pertemuan pengusaha daerah dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan yang dihadiri oleh 100 orang pengusaha daerah yakni sebesar 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan pertemuan Forum Komunikasi Usaha Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan tema " Memajukan Usaha Daerah Melalui Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Usaha",

G. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu sebesar Rp. 4.219.072.570,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 4.153.546.159,- atau sebesar 98,45% , dan realisasi anggaran kegiatan pada program ini pada umumnya diatas 95%.

Sisa Anggaran pada kegiatan dalam program ini sebagian besar sisa kegiatan yang tidak bisa direalisasikan karena pelaksanaan kegiatan. Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini dapat diwujudkan implementasi aplikasi SIP Sakato untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan di DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat sesuai target 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan perizinan serta terimplementasikannya aplikasi SIP Sakato bagi aparatur tim teknis dan operator pada OPD teknis.

2. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini dapat dicapai melebihi target yang direncanakan 21 fasilitasi permasalahan perizinan dari 15 yang ditargetkan atau sebesar 140%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah Terfasilitasinya dan Termediasinya Permasalahan Dalam Pelayanan Perizinan di Sumatera Barat dengan realisasi sebanyak 21 Permasalahan Pelayanan Perizinan.

3. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara Pelayanan Perizinan kepada 200 aparatur, dunia usaha, instansi teknis dan pemangku kebijakan sesuai target 100%.

Hasil:

Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan perizinan lingkup DPM & PTSP Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat.

4. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini dapat dicapai sesuai target yaitu tersosialisasinya kebijakan pelayanan perizinan kepada 660 orang aparatur, dunia usaha, pemuka masyarakat, KAN, LKAAM dan Wali nagari serta pemangku kebijakan, asosiasi organisasi profesi serta OPD teknis . target 100%

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman aparatur, dunia usaha, pemuka masyarakat, KAN, LKAAM dan Wali nagari serta pemangku kebijakan, asosiasi organisasi profesi serta OPD teknis tentang kebijakan pelayanan perizinan.

5. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini terlaksananya survey kepuasan kepada masyarakat yang menggunakan pelayanan perizinan sesuai dengan target 100%

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini diperolehnya hasil penilaian pelayanan perizinan yang diberikan oleh UPP pelayanan perizinan dengan score 3,27% yang masih dibawah target sebesar 3,35%.

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Keluaran:

Diterbitkannya perizinan dan non perizinan sebanyak 3.174 izin/rekomendasi dari target sebanyak 1.500 izin/rekomendasi, dengan demikian capaian kinerja adalah 211,60%..

Hasil:

Secara keseluruhan Persentase penerbitan perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai dengan SOP yakni sebesar 82,51%. Namun kalau dilihat ke masing – masing sektor masih adalzin yang dikeluarkan belum sesuai dengan SOP, ini disebabkan belum adanya penegasan kewenangan perizinan / penanaman modal antara BKPM RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi, masih belum berkantornya tim teknis dari OPD teknis di PTSP.

7. Penilaian Standar Mutu Perizinan

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini terlaksananya Audit atau Surveillance standar mutu perizinan dan meningkatnya quality management system Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan target 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adanya perubahan quality management system atau ISO dari 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015.

D. DATA KINERJA KEUANGAN

Capaian Kinerja Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 27.333.846,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.199.696,- atau capaian kinerja keuangan 84,88%, ini disebabkan ada belanja pengiriman paket yang tidak direalisasikan karena surat menyurat lebih banyak pengirimannya dalam bentuk elektronik.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik sebesar Rp. 171.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 168.769.888,- atau capaian kinerja keuangan 98,28%.

3. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor sebesar Rp. 539.454.079,- dan terealisasi sebesar Rp. 539.281.029,- atau capaian kinerja keuangan 99,97%.

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.975.350,- atau capaian kinerja keuangan 99,94%.

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.905.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,68%

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 13.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.996.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,97%

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 17.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.250.000,- atau capaian kinerja keuangan 94,70%.

8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah sebesar Rp. 492.840.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 492.211.792,- atau capaian kinerja keuangan 99,87%.

9. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur sebesar Rp. 15.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.250.000,- atau capaian kinerja keuangan 85,76%.

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp. 29.952.000 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.755.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,34%.

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Mebeuler

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mebeuler sebesar Rp. 26.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.592.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,60%.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantorsebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.950.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,90%.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp. 155.657.261,- dan terealisasi sebesar Rp. 149.928.778,- atau capaian kinerja keuangan 96,32%.

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 52.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.675.000,- atau capaian kinerja keuangan 97,68%.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebeuler sebesar Rp. 9.385.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.365.500,- atau capaian kinerja keuangan 99,79%.

6. Pengadaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 305.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 300.281.450,- atau capaian kinerja keuangan 98,45%.

C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya sebesar Rp. 44.460.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.460.000,- atau capaian kinerja keuangan 100%

D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 977.974.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 905.923.540,- atau capaian kinerja keuangan 92,63%.

E. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD sebesar Rp. 54.790.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.366.834,- atau capaian kinerja keuangan 97,40%.

2. Penatausahaan Keuangan SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD sebesar Rp. 226.994.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 220.243.800,- atau capaian kinerja keuangan 97,03%.

3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 90.178.876,- dan terealisasi sebesar Rp. 89.344.207,- atau capaian kinerja keuangan 99,07%.

4. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD sebesar Rp. 35.303.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.203.550,- atau capaian kinerja keuangan 99,72%.

5. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD sebesar Rp. 121.938.573,- dan terealisasi sebesar Rp. 119.878.078,- atau capaian kinerja keuangan 98,31%.

F. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebesar Rp. 165.358.360,- dan terealisasi sebesar Rp. 164.726.125,- atau capaian kinerja keuangan 99,62%.

2. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 70.761.480,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.687.590,- atau capaian kinerja keuangan 98,48%.

3. Kerjasama Promosi dan Misi Investasi

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Kerjasama Promosi dan Misi Investasi sebesar Rp. 197.217.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 186.456.285,- atau capaian kinerja keuangan 94,54%.

4. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebesar Rp. 141.615.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 140.701.500,- atau capaian kinerja keuangan 99,35%.

5. Gelar Potensi dan Temu Usaha

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha adalah sebesar Rp. 554.963.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 551.505.695,- atau capaian kinerja keuangan 99,38%.

6. Promosi Investasi

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Promosi Investasi adalah sebesar Rp. 2.550.856.320,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.527.953.950,- atau capaian kinerja keuangan 99,10%.

7. Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategi Promosi Peluang Investasi sebesar Rp. 37.584.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.612.000,- atau capaian kinerja keuangan 89,43%.

8. Forum Investasi Sumatera Barat

Dukungan Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Forum Investasi Sumatera Barat sebesar Rp. 115.301.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 102.808.450,- atau capaian kinerja keuangan 89,16%.

9. Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi

Dukungan Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi sebesar Rp. 165.672.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 163.170.870,- atau capaian kinerja keuangan 98,49%.

10. Penyelesaian Permasalahan Investasi

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi adalah sebesar Rp. 60.451.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 58.450.140,- atau capaian kinerja keuangan 96,69%.

11. Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 145.357.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 142.563.920,- atau capaian kinerja keuangan 98,08%.

12. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 42.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.734.200,- atau capaian kinerja keuangan 92,01%.

13. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal adalah sebesar Rp. 83.180.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 79.894.200,- atau capaian kinerja keuangan 96,05%.

14. Forum Komunikasi Usaha Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Gelar Forum Komunikasi Usaha Daerah sebesar Rp. 112.001.050,- dan terealisasi sebesar Rp. 111.104.800,- atau capaian kinerja keuangan 99,20%.

G. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi sebesar Rp. 406.740.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 390.378.480,- atau capaian kinerja keuangan 95,98%.

2. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu sebesar Rp. 115.579.780,- dan terealisasi sebesar Rp. 114.369.400,- atau capaian kinerja keuangan 98,95%.

3. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan sebesar Rp. 155.098.240,- dan terealisasi sebesar Rp. 147.680.600,- atau capaian kinerja keuangan 95,22%.

4. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan sebesar Rp. 1.176.886.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.146.095.086,- atau capaian kinerja keuangan 97,38%.

5. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 326.573.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 320.109.335,- atau capaian kinerja keuangan 98,02%.

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp. 2.003.193.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.000.628.258,- atau capaian kinerja keuangan 99,87%.

7. Penilaian Standar Mutu Perizinan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penilaian Standar Mutu perizinan sebesar Rp. 35.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.285.000,- atau capaian kinerja keuangan 97,96%

IV. PENUTUP

Pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai jadwal dan target yang direncanakan bahkan ada beberapa kegiatan yang melebihi target yang direncanakan. Sehubungan dengan adanya beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 95% terkait dengan adanya efisiensi pada beberapa belanja seperti perjalanan dinas luar daerah, Sewa Tempat, Jasa Akomodasi, Bantuan Transportasi serta sisa anggaran yang benar – benar tidak bisa direalisasikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 ini disusun agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Januari 2020
KEPALA DPM & PTSP
PROVINSI SUMATERA BARAT



MASWAR DEDI, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740618 199311 1 001